

## Demonstrasi Politik Di Hongkong Tahun 2019

Anna Yulia Hartati

Dosen Fisip/Hubungan Internasional, Universitas Wahid Hasyim

Email : [annayuliahartati@gmail.com](mailto:annayuliahartati@gmail.com)

*Artikel ini menganalisis tentang kemunculan kelompok pro demokrasi dalam demonstrasi politik di Hong Kong dalam bentuk partisipasi politik. . Hong Kong, salah satu pusat keuangan global, tenggelam dalam kekacauan selama hampir dua bulan. Selama delapan pekan, Hong Kong diwarnai gelombang aksi protes atas Rancangan Undang-undang Ekstradisi. Rangkaian peristiwa yang berpuncak pada aksi kekerasan kepada pelaku unjuk rasa itu menciptakan ketegangan baru di wilayah pulau yang memiliki otonomi khusus tersebut. Kemelut politik di Hong Kong bermula ketika Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam menolak untuk menarik RUU Ekstradisi yang memungkinkan ekstradisi pelaku kriminal di Hong Kong ke China daratan. Kebijakan itu dipandang dapat mengancam otonomi khusus yang dimiliki wilayah bekas jajahan Inggris tersebut. Ada delapan taktik yang dipakai oleh kelompok demonstran, yaitu Leaderless resistance, menggunakan teknologi, open source protest, menetralkan gas air mata, menghindari bentrokan dengan aparat, penggalangan dana, konsep be water, dan menggunakan bahasa isyarat. Sejak Inggris mengembalikan Hong Kong kepada China pada 1997, Hong Kong menikmati status spesial yang dikenal dengan prinsip one country, two systems. Artinya, meski menjadi bagian dari China, Hong Kong memiliki otonomi sendiri, kecuali untuk urusan luar negeri dan pertahanan, selama 50 tahun sejak diserahkan kembali. Dengan status tersebut, Hong Kong memiliki sistem hukum tersendiri dan memungkinkan warganya menikmati kebebasan yang tidak bisa dinikmati di China daratan, seperti kebebasan berkumpul dan berpendapat. Para kritikus mengatakan undang-undang ekstradisi dapat mengancam kedaulatan hukum Hong Kong dan reputasi internasionalnya sebagai pusat keuangan Asia. Penentang RUU Ekstradisi juga khawatir kebijakan akan menempatkan mereka pada posisi yang tidak menyenangkan di bawah sistem peradilan China, di mana hak asasi manusia tidak dijamin. Metode Penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif, dengan sumber data studi pustaka.*

***Kata Kunci: Demonstrasi Politik Hongkong, Kelompok Pro Demokrasi, Taktik Demonstrasi***

### A. PENDAHULUAN

Sejak Inggris mengembalikan Hong Kong kepada China pada 1997, Hong Kong menikmati status spesial yang dikenal dengan prinsip *one country, two systems*. Artinya, meski menjadi bagian dari China, Hong Kong memiliki otonomi sendiri, kecuali untuk urusan luar negeri dan pertahanan, selama 50 tahun sejak diserahkan kembali. Dengan status tersebut, Hong Kong memiliki sistem hukum tersendiri dan memungkinkan warganya menikmati kebebasan yang tidak bisa dinikmati di China daratan, seperti kebebasan berkumpul dan berpendapat. Para kritikus mengatakan undang-undang

ekstradisi dapat mengancam kedaulatan hukum Hong Kong dan reputasi internasionalnya sebagai pusat keuangan Asia. Penentang RUU Ekstradisi juga khawatir kebijakan akan menempatkan mereka pada posisi yang tidak menyenangkan di bawah sistem peradilan China, di mana hak asasi manusia tidak dijamin.

Pemerintah Hong Kong mengklaim bahwa pengajuan RUU Ekstradisi diperlukan untuk menutup celah Hong Kong menjadi surga bagi para buronan. Pembahasan RUU tersebut pun memicu perselisihan di antara legislator kubu pro-demokrasi dengan pro-Beijing. Namun Carrie Lam kukuh pemerintahannya akan mempertahankan RUU tersebut. Awal Juni 2019 muncul petisi menolak RUU Ekstradisi yang ditandatangani 120.000 siswa, alumni, staf, dan orang tua dari 185 sekolah menengah. Penolakan terhadap RUU memuncak pada 9 Juni 2019, ketika pendemo, yang jumlahnya diklaim lebih dari sejuta orang, turun ke jalan menyuarkan protes. Aksi damai yang berlangsung hingga dini hari itu lalu berubah menjadi bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa. Sehari setelah unjuk rasa itu, Lam masih bertahan dengan rencana pemerintah mengajukan RUU Ekstradisi. Dia membantah mengabaikan reaksi publik yang besar dan mengatakan pemerintahannya telah membuat konsesi besar untuk memastikan kebebasan warga kota. Menurutnya, warga Hong Kong akan dilindungi dan perlindungan hak asasi manusia rancangan undang-undang tersebut memenuhi standar internasional.

Ratusan pengunjuk rasa kembali turun ke jalanan, mengepung gedung parlemen beberapa jam sebelum pembahasan RUU oleh legislator, pada 12 Juni 2019. Mereka mengancam tidak akan berhenti sebelum pemerintah mencabut kebijakan tersebut. Aksi itu berhasil memaksa pemerintah setempat menunda debat putaran kedua RUU. Pemerintah juga sempat menutup kantor-kantor pemerintahan di distrik keuangan kota tersebut, setelah aksi 12 Juni berakhir dengan bentrokan dan menimbulkan puluhan korban luka. Setelah serangkaian aksi protes tersebut, pada 14 Juni, Lam mengumumkan akan menunda pengajuan RUU Ekstradisi tanpa waktu yang ditentukan.

Namun, rupanya hal itu tidak membuat demonstran puas, sebab mereka menginginkan adanya pencabutan total. Pengunjuk rasa yang tak puas menuntut agar Lam mundur dari jabatannya. Diperkirakan sekitar 2 juta orang turut dalam aksi menuntut Lam mundur pada 16 Juni. Aksi protes terus berlanjut hingga pekan-pekan

berikutnya. Demonstrasi juga terjadi pada saat hari peringatan kembalinya kota itu ke pemerintahan China, pada 1 Juli. Sepekan lebih kemudian, Carrie Lam menegaskan bahwa aturan kontroversial terkait dengan ekstradisi ke China dibatalkan. Bagaimana aksi massa yang telah berlangsung berbulan-bulan di sebuah negara padat seperti Hong Kong, dengan juga turut menghadirkan khaos di sana-sini, masih mampu menimbulkan simpati dari banyak warga asing?

## B. KERANGKA PEMIKIRAN

### KONSEP PARTISIPASI POLITIK

Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.<sup>1</sup> Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.<sup>2</sup> Definisi partisipasi politik yang cukup senada disampaikan oleh Silvia Bolgherini. Menurut Bolgherini, partisipasi politik " ... *a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a more or less direct way—legal, conventional, pacific, or contentious.*"<sup>3</sup> Bagi Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung -- dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa. Studi klasik mengenai partisipasi politik diadakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam karya penelitiannya *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Lewat penelitian mereka, Huntington and Nelson memberikan suatu catatan: Partisipasi yang bersifat *mobilized* (dipaksa) juga termasuk ke dalam kajian partisipasi politik. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bolgherini yaitu bahwa dalam melakukan partisipasi politik, cara yang digunakan salah satunya yang bersifat paksaan (*contentious*). Bagi Huntington and Nelson, perbedaan partisipasi politik sukarela dan

---

<sup>1</sup>Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) h. 9-10.

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup>Silvia Bolgherini, "Participation" dalam Mauro Calise and Theodore J. Lowi, *Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political Science Concept* (Chicago: The University of Chicago, 2010) p. 169.

mobilisasi (diarahkan, senada dengan dipaksa) hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan: Intinya baik sukarela ataupun dipaksa, warganegara tetap melakukan partisipasi politik.

Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Sistem politik memiliki pengaruh untuk menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik warganegaranya. Pola partisipasi politik di negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal tentu berbeda dengan di negara dengan sistem Komunis atau Otoritarian. Bahkan, di negara-negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal juga terdapat perbedaan, seperti yang ditunjukkan Oscar Garcia Luengo, dalam penelitiannya mengenai *E-Activism: New Media and Political Participation in Europe*.<sup>4</sup>Warganegara di negara-negara Eropa Utara (Swedia, Swiss, Denmark) cenderung lebih tinggi tingkat partisipasi politiknya ketimbang negara-negara Eropa bagian selatan (Spanyol, Italia, Portugal, dan Yunani).

### **Landasan Partisipasi Politik**

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi:<sup>5</sup>

1. kelas – individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
2. kelompok atau komunal – individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
3. lingkungan – individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan.
4. partai – individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan
5. golongan atau faksi – individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-

---

<sup>4</sup>Oscar Garcia Luengo, *E-Activism New Media and Political Participation in Europe*, (CONFINES 2/4 agosto-diciembre 2006)

<sup>5</sup>Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi ... op.cit.*

client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

### **Mode Partisipasi Politik**

Mode partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik. Model ini terbagi ke dalam 2 bagian besar: *Conventional* dan *Unconventional*. *Conventional* adalah mode klasik partisipasi politik seperti Pemilu dan kegiatan kampanye. Mode partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. *Unconventional* adalah mode partisipasi politik yang tumbuh seiring munculnya Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*). Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan (*environmentalist*), gerakan perempuan gelombang 2 (*feminist*), protes mahasiswa (*students protest*), dan teror.

Jika mode partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

1. Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
2. Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
3. Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
4. Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
5. Tindakan Kekerasan (*violence*) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan. Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal. Sebab

itu, penyusunan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini.

## C. PEMBAHASAN

### C.1. WACANA EKSTRADISI

Pada Februari 2019, hampir setahun setelah penangkapan Chan Tong-kai, pemerintah Hong Kong menjadikan kasus tersebut sebagai dasar untuk mengusulkan undang-undang yang akan memungkinkan mereka mengekstradisi tersangka kriminal ke Taiwan dan tempat-tempat lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi --termasuk salah satunya, China daratan. Ekstradisi Chan Tong-kai didasari pada alasan bahwa kasus tersebut terjadi di tanah Taiwan, maka, pelaku harus dihukum berdasarkan hukum pidana di sana. Kasus pembunuhan itu kemudian dijadikan alat kampanye yang tergesa-gesa oleh pemerintah untuk mendorong RUU Ekstradisi atau bernama resmi The Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019.

Kepala eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, dan atasannya dalam kepemimpinan China tampak yakin mereka memiliki strategi untuk meloloskan undang-undang. Lam juga menyebut bahwa RUU Ekstradisi akan membantu wilayah semi-otonomi China untuk menegakkan keadilan dan memenuhi kewajiban internasionalnya dalam hal mencegah Hong Kong sebagai lokasi safe haven para buron kriminal internasional. Akan tetapi, mereka meremehkan ketakutan dan kecurigaan publik terhadap Beijing, memprovokasi protes terbesar Hong Kong dalam beberapa dekade sementara juga kembali membangkitkan kelompok pro-demokrasi yang sempat senyap di wilayah itu sejak Protes Payung 2014.

Para pengkritik RUU dan kelompok pro-demokrasi melihat produk hukum itu sebagai bagian dari erosi kebebasan sipil mereka --yang sejak lama dipandang sebagai keuntungan dan pembeda utama Hong Kong dari daratan Tiongkok. Lebih lanjut, para pengkritik mengatakan bahwa undang-undang akan menempatkan penduduk Hong Kong dalam risiko terperangkap dalam sistem peradilan China yang mereka nilai "keruh", di mana para terdakwa dapat menghadapi proses hukum yang tidak adil dalam suatu sistem di mana sebagian besar pengadilan pidana berakhir dengan vonis hukuman. Hal itu juga memacu kritik bahwa sistem peradilan Tiongkok tidak akan menjamin hak yang sama bagi para terdakwa layaknya di Hong Kong. Lam akhirnya

menyerah pada tekanan publik, menunda undang-undang tersebut "hingga waktu yang tidak ditentukan" namun menolak tuntutan massa yang ingin agar RUU tamat sepenuhnya dan pengunduran diri sang kepala eksekutif.

Demonstrasi Hong Kong masih berlanjut. Aksi terakhir yang dilakukan para demonstran adalah menduduki Bandara Internasional Hong Kong pada Jumat (9/8/2019). Kali ini aksi yang digelar difokuskan demi mendapat dukungan publik global terkait isu penolakan RUU Ekstradisi yang sepanjang dua bulan terakhir terus disuarakan. Para demonstran yang mayoritas berpakaian hitam berkumpul di ruang tunggu bandara untuk menyiarkan "kebenaran" yang terjadi di Hong Kong kepada para penumpang pesawat, wabilkhusus warga negara asing. "Tidak ada perusuh, hanya tirani," demikian yang selalu mereka teriakkan. Selain itu, para demonstran juga mengangkat spanduk dan kertas--dalam bahasa Tiongkok dan Inggris--yang mengutuk kekerasan polisi: "Selamatkan Hong Kong dari tirani dan brutalitas polisi!"

## C.2. AKSI KELOMPOK PRO DEMOKRASI

Taktik pertama yang digunakan oleh para demonstran Hong Kong adalah meniadakan sosok pemimpin dalam aksi mereka. Taktik perlawanan tanpa pimpinan ini lazim dikenal dengan istilah *leaderless resistance*. Dengan berbagai varian, sejatinya taktik ini juga digunakan oleh kalangan kanan, kiri, anarkis, hingga jihadis. *Leaderless resistance* adalah konsep yang digagas oleh Kolonel Ulius Louis Amoss, seorang mantan perwira intelijen AS, pada awal 1960-an. Amoss melihat konsep tanpa pimpinan tersebut dapat efektif mencegah penetrasi sekaligus menghancurkan penghancuran sel-sel komunis di negara-negara Eropa Timur di bawah kendali Uni Soviet.

Pada 1983, seorang anggota Ku Klux Klan, Louis Beam, kembali menggemakan konsep *leaderless resistance* melalui esainya. Hal yang sama kembali ia kemukakan pada 1992. Menurut Beam, perlawanan tanpa pimpinan adalah teknik yang tepat bagi kaum nasionalis kulit putih untuk melanjutkan perjuangan melawan pemerintah AS, kendatipun banyak sekali ketidakseimbangan kekuatan dan sumber daya. Lantas bagaimana cara pengimplementasian taktik *leaderless resistance* oleh demonstran Hong Kong? Untuk menggantikan posisi komando, mereka mengorganisir diri dengan memanfaatkan teknologi--yang menjadi taktik selanjutnya. Dalam hal ini, konteks yang dimaksud adalah menggunakan pesan terenkripsi melalui aplikasi daring maupun aktif di berbagai forum online, terutama di LIHKG--semacam Reddit versi Hong Kong. Salah satu contohnya, sebagaimana termuat dalam laporan BBC, hampir 4.000 pengunjung rasa

memberikan suara di grup Telegram untuk menentukan apakah para demonstran pulang pada malam itu atau melanjutkan protes di luar markas polisi Hong Kong. Sebanyak 39% dari mereka memberikan suara ke pos polisi, kendati pengepungan selama enam jam terus berlanjut.

Profesor Francis Lee dari Chinese University of Hong Kong, memiliki istilah menarik mengenai taktik tersebut: “open-source protest”. Ketiadaan pimpinan juga mendorong orang ingin terlibat dalam demonstrasi. Hal ini juga bisa jadi dilandasi perhitungan lain, semisal kemungkinan mereka diincar aparat tidak sebesar Joshua Wong yang menjadi pemimpin Umbrella Movement atau Benny Tai dan Chan Kin-man yang menggagas rencana Occupy Central. Satu hal yang jelas, taktik tersebut secara tidak langsung menunjukkan bagaimana penerapan demokrasi partisipatif yang organik, sehat, dan tepat sasaran. Kembali ke penggunaan aplikasi pesan. Selain Telegram, fitur lain seperti Airdrop--sayangnya ini hanya terdapat di iPhone--, juga dapat digunakan untuk menyebar poster dan spanduk, bahkan hingga menyasar ke masyarakat, tentang aksi selanjutnya secara cepat dan tanpa sambungan kabel. Sebelum turun aksi, para demonstran di Telegram biasanya juga saling mengingatkan "untuk mengaktifkan AirDrop!". Sementara itu, ketika aksi berlangsung panas di lapangan, para demonstran di garis depan lazim menggunakan taktik bahasa isyarat untuk mengkomunikasikan hal-hal tertentu. Misalnya untuk meminta agar beberapa peralatan yang dibutuhkan segera sampai ke depan. Nantinya, rantai manusia yang terbentang panjang itu akan bahu membahu membawakan alat atau barang yang dimaksud dari belakang hingga ke depan.

Taktik Kedua, menggunakan Teknologi, *Fitur Airdrop Iphone*, yaitu mengirim teks atau gambar tanpa koneksi internet. Taktik Ketiga, *open source protest*, para demonstran mendorong semua orang terlibat dalam aksi mereka. Taktik Keempat, Menetralisir gas air mata. Tim ini biasanya hanya terdiri dari lima sampai enam orang dan menempati posisi sedikit di belakang garis depan. Ketika gas air mata dilemparkan polisi, mereka akan segera menutupnya menggunakan peralatan khusus, yaitu traffic cone, agar persebaran asapnya bisa dibatasi, lalu memadamkannya dengan menuangkan air ke dalam cerobong asap tersebut. Kelima, Menghindari bentrokan dengan aparat. Para demonstran Hong Kong juga memiliki taktik lain yaitu menghindari bentrokan dengan aparat demi mencegah munculnya korban. Sadar tidak memiliki peralatan berat atau taktik pertempuran urban yang mumpuni, mereka akan mencegah bentrok dengan cara

setertib dan sedisiplin mungkin. Demonstran di garis terdepan akan memberi aba-aba “satu-dua” sebelum kemudian diikuti oleh garis berikutnya di belakang mereka.

Taktik menghindari bentrok tersebut juga diaplikasikan oleh para demonstran bergerak cair menyebar ke berbagai titik dan tidak lagi memaksakan diri untuk mengokupasi tempat-tempat tertentu, kecuali memang memiliki urgensi terkait agenda mereka. Seperti pendudukan bandara yang dimaksudkan demi mendapat dukungan publik global, misalnya. Taktik keenam yang digunakan para demonstran adalah mengadakan penggalangan dana dengan tujuan mereka dapat beriklan satu halaman penuh di berbagai surat kabar terkemuka di dunia. Momentum yang mereka incar adalah KTT G-20 yang digelar di Osaka, Jepang, pada akhir Juni 2019 lalu. Crowdfunding tersebut pun berhasil dengan spektakuler. Hanya dalam beberapa jam saja, dana yang terkumpul mencapai lebih dari £600,000. Relawan khusus bagian desain grafis kemudian membuat poster-poster menarik lalu mengirimnya via surat elektronik ke berbagai surat kabar dunia. Alhasil, iklan hitam putih satu halaman penuh dengan pesan “Stand with Hong Kong at G20” tayang mulai dari New York Times, The Guardian, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, The Australian, Asahi Shimbun, Globe & Mail, hingga Seoul Daily, beberapa hari jelang KTT G-20 resmi dimulai.

Taktik Ketujuh, konsep *be water*. Taktik ini terinspirasi dari kata-kata Bruce Lee yang terkenal, “Be water”, tentang kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi apa pun. Taktik Kedelapan, Menggunakan bahasa isyarat. Taktik inilah yang membawa kelompok pro demokrasi Hong Kong bertahan dan banyak mendapat dukungan.

#### D. KESIMPULAN

Demonstrasi terus dilakukan masyarakat guna memperjuangkan lima hal dari pemerintahan Hong Kong, yaitu menghapus sepenuhnya RUU Ekstradisi, menarik sebutan "rusuh" kepada para demonstran, mencabut tuduhan kriminal bagi para demonstran, melakukan investigasi menyeluruh atas tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian, dan membubarkan dewan legislatif saat ini yang pro Cina dan menerapkan hak pilih universal ganda (demokrasi berbasis rakyat).

## DAFTAR PUSTAKA

Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)

Bolgherini, Silvia , "*Participation*" dalam Mauro Calise and Theodore J. Lowi, *Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political Science Concept* (Chicago: The University of Chicago, 2010) p. 169.

Luengo, Oscar Garcia *E-Activism New Media and Political Participation in Europe*, (CONFINes 2/4 agosto-diciembre 2006)

Thomas M. Magstadt, *Understanding Politics* (Belmont: Cengage Learning, 2012)

Bacha, Christina Holtz-, *Political Disaffection*, dalam dalam Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, *Encyclopedia of Political Communication*, (California : Sage Publications, 2008)